

## PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA: STUDI KORELASIONAL ANTARA TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PENGELOLAAN APBDES DI GAMPONG COT LAOT

Zalikhah<sup>1</sup>, Emalia Ariska<sup>2</sup>, M. Yusuf<sup>3</sup>, Mulyadi<sup>4</sup>, Muchsin<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Jabal Ghafur

Email : [zalikha.se82@gmail.com](mailto:zalikha.se82@gmail.com)

### ABSTRACT

*The management of APBDes funds signifies that all planning, which is the result of an agreement between the village government and the village consultative body, encompasses expenditures stipulated for the administration of village governance for one year. The objective of this research is to analyze the influence of village government transparency and accountability on the management of the village revenue and expenditure budget (APBDes) in Gampong Cot Laot, Peudada Subdistrict, Bireuen Regency. To obtain optimal results, the data scope was derived from respondent answers through questionnaire questions distributed to 40 respondents, namely the community of Cot Laot Village, Peudada Subdistrict, Bireuen Regency. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression. The research results, both partially and simultaneously, indicate that village government transparency and accountability have a positive and significant influence on the management of APBDes in Cot Laot Village, Peudada Subdistrict, Bireuen Regency.*

**Keywords:** *Transparency, Village Government Accountability, and APBDes Management*

### ABSTRAK

Pengelolaan Dana APBDes memiliki makna bahwa seluruh perencanaan yang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa yang memuat pengeluaran yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Pada Gampong Cot Laot Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka ruang lingkup data diperoleh dari jawaban responden melalui pertanyaan kuesioner yang dibagikan kepada 40 responden yaitu Masyarakat Desa Cot Laot Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian secara parsial dan simultan transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan APBdes Cot Laot Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen

**Kata Kunci:** *Transparansi, Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pengelolaan APBdes*

### PENDAHULUAN

Regulasi pengelolaan keuangan desa di Indonesia, yang termanifestasi dalam Permendagri No. 113/2014, mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai instrumen perencanaan finansial tahunan pemerintah desa. Sejak 2015, implementasi kebijakan dana desa, dengan alokasi signifikan mencapai ratusan juta rupiah per desa melalui mekanisme transfer kabupaten tanpa pemotongan, menghadapi paradoks.

Meskipun ketersediaan dana melimpah, keraguan dalam penyerapan dan pemanfaatan dana tersebut masih mengemuka di kalangan aparat desa. Akar permasalahan ini diidentifikasi pada ambiguitas prosedural terkait pencairan dan operasionalisasi dana desa, yang berimplikasi pada defisit kepercayaan dalam kapasitas pengelolaan.

Permendagri No. 20/2018 memperluas cakupan pengelolaan keuangan desa dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, mengartikulasikan beragam sub-bidang dan kegiatan yang esensial bagi fungsi pemerintahan, termasuk implementasi pembangunan desa. Spektrum pembangunan ini melampaui konstruksi fisik semata, mencakup inisiatif non-fisik seperti pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat dalam sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan area lainnya.

APBDes berfungsi sebagai wahana diseminasi informasi mengenai aktivitas desa, pengelolaan keuangan, dan rencana program yang didanai oleh dana desa kepada masyarakat dan pemerintah. Dokumen ini merinci struktur pendapatan, pengeluaran, dan sumber pembiayaan desa. Sejalan dengan Sujarweni (2017), anggaran desa memfasilitasi formulasi tujuan pembiayaan pembangunan dan identifikasi sumber daya. Lebih lanjut, perspektif Lembaga Administrasi Negara dan BPKP RI (2020) mendefinisikan akuntabilitas sebagai imperatif untuk mempertanggungjawabkan, menjawab, dan menjelaskan kinerja serta tindakan kepada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Penyusunan APBDes dan alokasi dana desa merupakan manifestasi desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik—yakni, pemerintahan yang kuat, bertanggung jawab, efisien, dan efektif, dengan sinergi positif antar sektor publik, swasta, dan masyarakat. Internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik di tingkat desa menghadapi tantangan. Oleh karena itu, pemahaman fundamental mengenai akuntabilitas dan transparansi bagi seluruh pemangku kepentingan, dari aparat hingga masyarakat, krusial untuk memitigasi apatisme dalam siklus pengelolaan dana desa (Solekhan, 2017).

Pengesahan UU No. 6/2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014 menandai era baru bagi pendanaan desa di Indonesia. Undang-undang ini, hasil negosiasi selama tujuh tahun, melegitimasi sumber pendanaan bagi sekitar 73.000 desa dari kontribusi pemerintah pusat

dan daerah. Regulasi ini memberikan jaminan pendanaan yang lebih substansial, berpotensi mencapai satu miliar rupiah per desa, melalui APBN dan APBD.

Sub-bidang pendidikan mencakup pengembangan lembaga pendidikan non-formal dan infrastruktur perpustakaan/taman bacaan desa. Pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi pembangunan infrastruktur fisik seperti jembatan dan jalan desa, serta fasilitas publik. Pemenuhan kebutuhan lingkungan permukiman berfokus pada sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah. Sub-bidang kesehatan mencakup penguatan sarana dan prasarana layanan kesehatan tingkat desa.

Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) (2023) mengidentifikasi sejumlah permasalahan dalam pengelolaan APBDes di Indonesia, termasuk korupsi oleh oknum kepala desa, yang mengakibatkan kerugian finansial dan sosial. Defisiensi transparansi menghambat pengawasan masyarakat, sementara keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan pengaruh politik/nepotisme dalam alokasi dana memperparah ketidakmerataan. Keterlambatan pencairan dana dan kompleksitas regulasi juga menjadi kendala implementasi.

Gampoeng Cot Laot di Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, peternak, dan nelayan, menghadapi tantangan spesifik dalam realisasi APBDes. Data menunjukkan proporsi signifikan penduduk bekerja di sektor primer. Prinsip-prinsip Peraturan Desa yang diamanatkan oleh UU No. 6/2014 merepresentasikan perubahan fundamental dalam pendekatan pengaturan desa. Desa kini diposisikan sebagai subjek dan pilar utama pembangunan, bukan sekadar objek. Informasi mengenai alokasi anggaran Gampoeng Cot Laot tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1.**

**Anggaran Gampoeng Cot Laot Kecamatan Peudada Tahun 2023**

No	Keterangan	Jumlah
1	Dana Desa	Rp. 658.221.000
2	Alokasi Dana Desa	Rp. 130.602.000
3	Silpa Dana Desa	Rp. 0.00
4	Silpa Alokasi Dana Desa	Rp. 0.00

5	Jumlah Pendapatan	Rp. 794.963.000
---	-------------------	-----------------

Data anggaran menunjukkan total pendapatan Gampoeng Cot Laot sebesar Rp. 794.963.000. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, sesuai Permendes No. 19/2017 dan Permendagri No. 20/2018, seharusnya mencakup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pengembangan sub-bidang pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan permukiman, dan kesehatan.

Analisis data APBDes Gampoeng Cot Laot menunjukkan tidak adanya alokasi anggaran untuk sub-bidang pendidikan, kesehatan, dan kawasan pemukiman. Indikasi tata kelola dan tanggung jawab yang tidak transparan tercermin dalam kurangnya sosialisasi penggunaan anggaran kepada masyarakat. Lebih lanjut, kekhawatiran terhadap akuntabilitas dan potensi penyalahgunaan jabatan oleh kepala desa menjadi risiko korupsi APBDes.

Akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik di Gampoeng Cot Laot belum optimal. Demikian pula, akuntabilitas program pembangunan yang diinisiasi oleh kepala desa memerlukan peningkatan dalam identifikasi efektivitas program dan formulasi tindakan korektif. Akuntabilitas kebijakan dan aspek finansial juga memerlukan penguatan melalui penjelasan yang jelas dan pertanggungjawaban komprehensif terkait penggunaan dana APBDes. Pemerintah desa Gampoeng Cot Laot belum sepenuhnya mengimplementasikan transparansi terkait kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat, serta belum menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan akuntabel.

UU No. 6/2014 mengamanatkan prioritas pengeluaran anggaran desa untuk kebutuhan pembangunan yang disepakati melalui musyawarah desa, selaras dengan prioritas pemerintah di berbagai tingkatan. Namun, di Gampoeng Cot Laot, meskipun alokasi untuk pembangunan signifikan, realisasi di beberapa aspek seperti pembangunan jembatan dan perbaikan jalan belum optimal, dan kualitas pelayanan publik belum memuaskan. Transparansi, menurut Mardiasmo (2019), adalah prinsip keterbukaan pemerintah dalam menyajikan informasi pengelolaan sumber daya publik kepada pihak berkepentingan, termasuk kebijakan dan program pembangunan desa (Sujarweni, 2017), serta informasi keuangan yang jujur dan terbuka. Transparansi dalam pengadaan barang/jasa memerlukan ketentuan yang jelas dan aksesibel. Prinsip ini didasarkan pada kebebasan memperoleh

informasi publik. Mardiasmo (2019) mengidentifikasi tiga karakteristik utama transparansi: informatif, keterbukaan, dan pengungkapan.

Akuntabilitas publik, sebagaimana didefinisikan oleh Mardiasmo (2019), adalah kewajiban pihak yang diberi mandat (agen) untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada pihak pemberi mandat (principal) yang berhak meminta pertanggungjawaban. Tuntutan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi fokus krusial, terutama di desa-desa yang menghadapi permasalahan seperti Gampoeng Cot Laot. Permendes No. 19/2017 menekankan prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan mengatasi kemiskinan. Prioritas spesifik mencakup infrastruktur dasar, pelayanan sosial (kesehatan, pendidikan, kebudayaan), dan lingkungan. Pemahaman komprehensif mengenai pengelolaan dana desa, dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, merupakan elemen esensial bagi pemangku kepentingan pemerintah desa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa (Indrawati, 2017). Keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Dana desa memiliki beragam sumber pendapatan, termasuk hibah Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Kebijakan ini mendorong aparat desa untuk menguasai tata cara dan tata kelola keuangan sebagai aspek krusial dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik (Kemendagri, 2016). Keterbatasan sumber keuangan desa, akibat ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran APBDes, menjadi hambatan umum. Akuntabilitas pemerintah desa, menurut Sukasmanto (2017), melibatkan pertanggungjawaban atas isu pembangunan dan tata kelola. Sujarweni (2017) mengidentifikasi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai faktor-faktor yang memengaruhi perencanaan keuangan desa.

Kajian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes. Sangki (2017) dan Wulandari (2020) menemukan pengaruh yang tidak signifikan atau tidak ada, sementara Putri et al. (2019) dan Kurniawan (2019) mengidentifikasi pengaruh positif signifikan. Kebaruan penelitian ini

terletak pada fokus spesifiknya pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes di Gampoeng Cot Laot, berkontribusi pada literatur dengan memberikan wawasan kontekstual. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini berjudul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Gampong Cot Laot Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen”.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Transparansi merupakan keterbukaan dari aparat desa dalam mengelola Dana Desa dalam pembangunan desa (Kristianten, 2018). Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto, Sahmuddin, and Arifuddin, 2017).

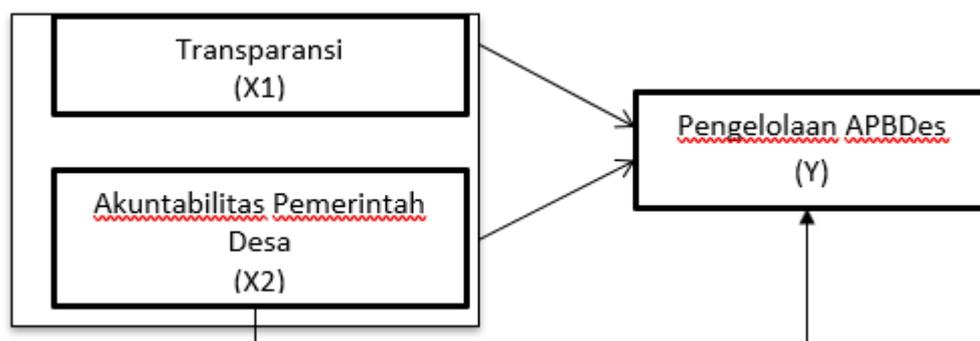
Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut sesuatu perencanaan diperlukan untuk menyesuaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian diatas pengelolaan dititik beratkan pada proses pengendalian dan pemanfaatan semua faktorsumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat (Ika Wulandari, 2020). APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang

diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus (Yuliansyah and Rusmianto, 2018).

Berdasarkan penelitian Ika Wulandari (2020) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pengelolaan dana APBDes, Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana APBDes. Putri et al. (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan peran perangkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Jenalas.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis yaitu sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Pada Gampong Cot Laot Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.
- H<sub>2</sub>: Akuntabilitas pemerintah desa berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Pada Gampong Cot Laot Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.
- H<sub>3</sub>: Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Pada Gampong Cot Laot Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.



**Gambar 1**

**Desain Penelitian**

**METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2022), data kuantitatif mengacu pada metodologi penelitian yang didasari pada data positivistik atau “konkret”. Artinya data berupa analisis numerik berdasarkan statistik digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian kuantitatif untuk memperoleh suatu kesimpulan. Data primer dalam penelitian ini ialah melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala likert 1 sampai 5. Adapun, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat Gampong Cot Laot Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen yang berjumlah 182 orang. Dengan penjumlahan sampel penelitian ini adalah  $182 \times 25 \% = 40,5$  sehingga dibulatkan menjadi 40 responden (Arikunto, 2017). Adapun teknik analisis data meliputi : uji instrument, asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi dengan software SPSS versi 24.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Uji Validitas

**Tabel 1.**

**Hasil Pengujian Validitas**

Item pertanyaan	Variabel	Koefisien korelasi	Nilai kritis (N=40)	Keterangan
Y1.1	Pengelolaan APBDes (Y)	0,931	0,312	Valid
Y1.2		0,855		
Y1.3		0,911		
Y1.4		0,925		
Y1.5		0,948		
X1.1	Transparansi (X1)	0,813	0,312	Valid
X1.2		0,764		
X1.3		0,826		
X1.4		0,870		
X1.5		0,597		

X2.1	Akuntabilitas Pemerintah Desa (X2)	0,945	0,312	Valid
X2.2		0,946		
X2.3		0,920		
X2.4		0,963		
X2.5		0,854		

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa Dari semua butir pertanyaan untuk masing-masing variabel (transparansi, akuntabilitas pemerintah desa dan pengelolaan APBDes) ternyata semua pertanyaan mempunyai status valid atau abash artinya setiap butir pertanyaan sah untuk dijadikan instrument penelitian.

#### b. Uji Reliabilitas

**Tabel 2.**

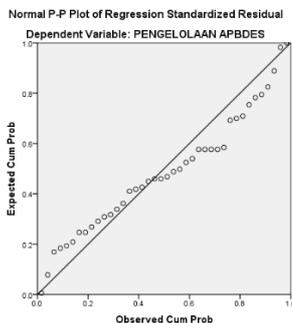
**Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha		Keterangan
			Hitung	Standar	
1	Pengelolaan APBDes	5	0,950	0,60	Handal
2	Transparansi	5	0,835	0,60	Handal
3	Akuntabilitas Pemerintah Desa	5	0,959	0,60	Handal

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa nilai reliabilitas instrument diatas menunjukkan tingkat reliabilitas instrument penelitian sudah memadai karena mendekati (>0,60). Dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan dari masing-masing variabel sudah menjelaskan atau memberikan gambaran tentang variabel yang diteliti..

#### c. Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas



**Gambar 2.**

**Hasil Uji Normalitas Probability Plot**

Berdasarkan dari gambar normal P-P Plot pada gambar 2 menunjukkan sebaran standarrized residual berada dalam kisaran garis diagonal. Dapat dilihat pula berdasarkan gambar tersebut bahwa sebaran data yang ada menyebar ke seluruh bagian kurva, sehingga dapat disimpulkan data memiliki distribusi normal.

**2. Uji Multikolinearitas**

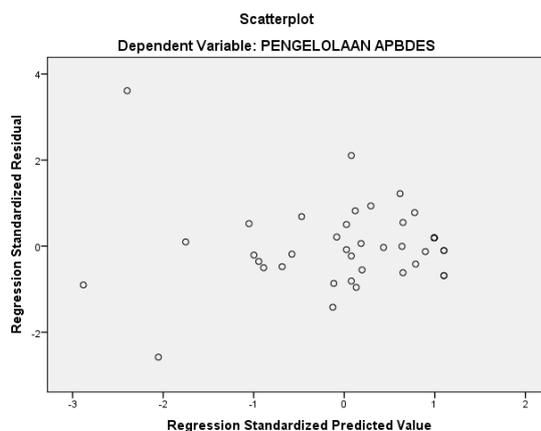
**Tabel 3.**

**Pengujian Multikolinearitas**

Variabel Bebas	Collineary Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Transparansi (X1)	0,403	2,483	Non multikolinieritas
Akuntabilitas Pemerintah Desa (X2)	0,403	2,483	Non multikolinieritas

Tabel 6 menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10 (10%) yang berarti bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

**3. Uji Heteroskedastisitas**



**Gambar 3.**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar 3 memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas/teratur, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian “tidak terjadi heterokedastisitas” pada model regresi.

**d. Hasil Regresi Berganda**

**Tabel 4.**

**Coefisient**

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
					B	Std. Error	Beta	Zero-order	Partial
1 (Constant)	0.251	0.266	0.943	0.352					
TRANSPARANSI	0.252	0.103	2.443	0.019	0.806	0.373	0.135	0.403	2.483

AKUNTABILITA	0.705	0.080	0.76	8.81	0.000	0.932	0.823	0.487	0.403	2.483
S PEMERITAH			8	9						
DESA										
a. Dependent Variable: PENGELOLAAN APBDES										

Berdasarkan tabel 4. persamaan regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 0,251 + 0,252X_1 + 0,705X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pengelolaan APBDes, tanpa variable transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa telah ada koefisien regresi sebesar 0,251. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBdes Cot Laot Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen tanpa pengaruh variabel-variabel bebas masih tergolong rendah.
2. Koefisien regresi transparansi sebesar 0,252 artinya setiap terjadi peningkatan pada variabel transparansi sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan pengelolaan APBdes Cot Laot Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, sebesar 0,252 atau 25,2%, apabila variabel lainnya konstan.
3. Koefisien regresi akuntabilitas pemerintah desa sebesar 0,705 artinya setiap terjadi peningkatan pada variabel akuntabilitas pemerintah desa sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan pengelolaan APBdes Cot Laot Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, sebesar 0,705 atau 70,5%, apabila variabel lainnya konstan.
4. Transparansi dengan t hitung sebesar 2,444 dengan nilai signifikansi 0,019 yang nilainya dibawah 0,05 dengan demikian nilai signifikansi yang lebih kecil ( $\alpha = 0,05$ ) maka H1 diterima artinya variabel transparansi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan APBdes Cot Laot Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.
5. Akuntabilitas pemerintah desa dengan t hitung sebesar 8.819 dengan nilai signifikansi 0,000 yang nilainya dibawah 0,05 dengan demikian nilai signifikansi yang lebih kecil ( $\alpha = 0,05$ ) maka H2 diterima artinya variabel akuntabilitas pemerintah desa secara parsial

berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan APBdes Cot Laot Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.

**e. Uji F (Simultan)**

**Tabel 5.**  
**Annova**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	34.170	2	17.085	145.344	0.000 <sup>b</sup>
	Residual	4.349	37	0.118		
	Total	38.519	39			
a. Dependent Variable: PENGELOLAAN APBDES						
b. Predictors: (Constant), AKUNTABILITAS PEMERITAH DESA, TRANSPARANSI						

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dapat dibuktikan bahwa hipotesis alternatif (Ha) dalam penelitian ini dapat diterima. Nilai Fhitung pada tabel diatas adalah 145.344 dengan Ftabel 2.84 sig 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBdes Cot Laot Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.

**f. Koefisien Determinasi**

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	

1	0.94	0.88	0.881	0.343	0.887	145.34	2	37	0.000	1.800
	2 <sup>a</sup>	7				4				
a. Predictors: (Constant), AKUNTABILITAS PEMERITAH DESA, TRANSPARANSI										
b. Dependent Variable: PENGELOLAAN APBDES										

Berdasarkan tabel 6. dapat diketahui adanya nilai (Adjusted R Square) yaitu 0,881. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (X) memiliki pengaruh sebesar 88,1% terhadap variabel dependen (Y). Sedangkan, 11,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan APBDes

Terdapat hubungan positif variabel (transparansi), terhadap variabel (pengelolaan APBDes) yang ditunjukkan oleh hasil thitung > ttabel atau – thitung < ttabel yaitu  $2,444 > 2,021$ . Maka dapat disimpulkan bahwasanya transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBdes. Hasil penelitian sejalan dengan Riska Dwi Astuti (2021) yang menguji tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Tamalate Kabupaten Takalar dan hasil penelitian Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi (2022) yang menguji tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (studi pada seluruh desa di kecamatan kadipaten) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana APBDes. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional (Haryanto, Sahmuddin, and Arifuddin, 2017).

Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin transparan pengelolaan keuangan desa, semakin baik pula pengelolaan APBDes. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan desa, yang tidak hanya memperbaiki tata kelola keuangan tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

## **2. Pengaruh Akuntabilitas Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan APBDes**

Terdapat hubungan positif variabel X2 (akuntabilitas pemerintah desa), terhadap variabel Y (pengelolaan APBDes) yang ditunjukkan oleh hasil thitung > ttabel atau  $-thitung < ttabel$  yaitu  $8,819 > 2,021$ . Maka dapat disimpulkan bahwasanya akuntabilitas pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBDes. Hasil penelitian sejalan dengan Riska Dwi Astuti (2021) yang menguji tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Tamalate Kabupaten Takalar dan hasil penelitian Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi (2022) yang menguji tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa (studi pada seluruh desa di Kecamatan Kadipaten), menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan apabila diterapkan secara bersama-sama terhadap Pengelolaan dana APBDes.

Akuntabilitas dalam konteks pemerintah desa berarti adanya tanggung jawab yang jelas dan laporan yang transparan mengenai penggunaan dana desa. Pemerintah desa yang akuntabel harus mampu menjelaskan setiap keputusan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menilai apakah dana tersebut digunakan secara efisien dan efektif. Akuntabilitas juga mencakup pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar yang berlaku, yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan yang konstruktif.

Secara keseluruhan, akuntabilitas pemerintah desa berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan APBDes. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, pemerintah desa dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa anggaran desa digunakan secara optimal untuk kepentingan

bersama. Akuntabilitas tidak hanya memperbaiki tata kelola keuangan desa, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan transparansi, mencegah penyalahgunaan dana, dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan serta inklusif.

### **3. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap pengelolaan APBDES**

Berdasarkan hasil analisis statistik inferensial melalui uji F, penelitian ini secara empiris membuktikan adanya pengaruh simultan yang signifikan dan positif antara variabel transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Gampong Cot Laot, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen. Nilai F hitung yang tercatat sebesar 145.344 secara substansial melampaui nilai F tabel sebesar 2.84 pada derajat kebebasan yang relevan dan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05. Lebih lanjut, nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil daripada taraf signifikansi 0,05 memberikan konfirmasi statistik yang kuat untuk menolak hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya pengaruh simultan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, implementasi praktik transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa di Gampong Cot Laot memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan APBDes. Penerimaan hipotesis ketiga dalam penelitian ini mengimplikasikan bahwa kedua variabel independen tersebut tidak beroperasi secara terisolasi, melainkan berinteraksi dan secara kolektif memberikan kontribusi yang substansial terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa di Gampong Cot Laot.

Temuan ini memperoleh dukungan konvergen dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ika Wulandari (2020), yang meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana APBDes. Meskipun konteks dan variabel yang diteliti sedikit berbeda, hasil penelitian Wulandari juga mengindikasikan adanya pengaruh positif dari akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa. Kesamaan arah pengaruh ini memperkuat validitas eksternal temuan penelitian ini, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang diwakili oleh transparansi dan akuntabilitas, secara

konsisten berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga selaras dengan studi yang dilakukan oleh Putra Adi Kurniawan (2019) yang secara spesifik menguji pengaruh simultan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Temuan Kurniawan yang menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan secara simultan antara kedua variabel tersebut semakin memperkuat argumentasi bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar-pilar fundamental dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan bertanggung jawab. Konvergensi hasil dari berbagai penelitian ini, termasuk penelitian yang dilakukan di Gampong Cot Laot, menggarisbawahi pentingnya implementasi praktik transparansi dan akuntabilitas secara komprehensif sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di tingkat pemerintahan desa. Dengan adanya transparansi, masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan pengawasan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Secara simultan, kedua prinsip ini menciptakan sebuah mekanisme *check and balance* yang efektif, mendorong pengelolaan APBDes yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis statistik, penelitian ini menemukan bahwa transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDes Gampong Cot Laot, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 2,444 yang melebihi nilai t-tabel sebesar 2,021. Demikian pula, akuntabilitas pemerintah desa secara parsial juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDes Gampong Cot Laot, dengan

nilai t-hitung yang jauh lebih besar, yaitu 8,819, yang juga melampaui nilai t-tabel 2,021. Lebih lanjut, hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan, variabel transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDes Gampong Cot Laot, dengan nilai F-hitung sebesar 145.344 yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai F-tabel sebesar 2,84. Temuan ini mengindikasikan bahwa baik secara individual maupun bersama-sama, praktik transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa memiliki kontribusi positif yang signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa di Gampong Cot Laot.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. 2017. Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gampoeng Cot Laot. 2023. Data APBDes Gampoeng Cot Laot Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen. Pemerintah Gampong Cot Laot.
- Haryanto, Sahrudin, and Arifuddin. 2017. Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. Buku Pintar Dana Desa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ika Wulandari. 2020. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Bondowoso, Skripsi UIN KHAS. (Unpublished).
- Indonesian Corruption Watch (IPW). 2023. Outlook Dana Desa 2023 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik, dapat diakses di WWW: [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/outlook\\_desa\\_2023\\_-\\_icw.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/outlook_desa_2023_-_icw.pdf) (diakses pada tanggal 15 Oktober 2023)
- Kemendagri. 2016. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Kemendagri. Jakarta.
- Kristianten. 2018. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi. 2022. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Kadipaten. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol. 3. No. 2.
- Putra Adi Kurniawan. 2019. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo). Skripsi UMM (Tidak Dipublikasi).
- Putri Dewi Kusumaningrum, Suharno dan Bambang Widarno. 2019. Akuntabilitas, Transparansi Dan Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Jenalas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 15 No. 4.

- Riska Dwi Astuti. 2021. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tamalate Kabupaten Takalar. Skripsi UIN Khas Jember.
- Sangki,Adianto Asdi, Ronny Gosal dan Josef Kairupan. 2017. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Tandu Kecamatan Lobak Kabupaten Bolaang Mongondow). E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 1(1).
- Solekhan, Mochammad. 2017. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara. Press
- Sujarweni,Y. Wiratna. 2017. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sukasmanto, D. Mariana. 2017. Mengembangkan BUMDesa untuk Transformasi Ekonomi Desa. Policy Brief Intitute for Research and Empowerment.
- Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta,
- Yuliansyah, and Rusmianto. 2018. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat,